

**PEMANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**  
**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG**  
**RENCANA UMUM ENERGI DAERAH**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

1. JUDUL RAPERDA

raperda ini merupakan sebuah rencana umum yang akan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Untuk itu FRAKSI PKS mengusulkan agar judul raperda ini ditambahkan periodisasi sehingga menjadi **Rencana Umum Energi Daerah DIY tahun 2018 - 2050**. Mohon tanggapannya.

2. VISI ENERGI DIY

DIY merupakan daerah importer energy karena tidak adanya deposit sumber energy konvensional local. Jadi untuk memenuhi kebutuhan energy DIY masih menggantungkan pasokan energy dari luar daerah. Atas dasar ini kami mengusulkan agar visi Energi DIY ditinjau kembali. Frasa “pada khususnya dan Indonesia pada umumnya” sebaiknya dihilangkan dan diganti dengan “pada tahun 2050” Mohon tanggapannya

3. SASARAN DIVERSIFIKASI ENERGI DIY

Sasaran bauran energy primer di DIY pada tahun 2025 dan 2050 berbeda bahkan jauh dari sasaran bauran energy primer nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Sebagai contoh peran EBT menjadi 9 % di tahun 2025 dan naik menjadi 13 % pada tahun 2050 padahal dalam PP tersebut peran EBT paling sedikit 23 % pada tahun 2025 dan paling sedikit 31 % pada tahun 2050. Demikian juga pada peran minyak bumi, batubara dan gas bumi juga berbeda dengan PP. mengapa terjadi perbedaan yang sangat jauh ini ? apa pertimbangannya ? dan apakah Perbedaan ini sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat ? mohon penjelasan.

4. Berapa capaian EBT sampai pada tahun 2019 ini ? menurut kami capaian ini masih jauh dari target, untuk itu Fraksi PKS meminta agar Pemerintah DIY memberikan perhatian khusus pada pengembangan EBT ini. Mohon tanggapannya.

5. Konsumsi energy sector transportasi mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya volume kendaraan terutama kendaraan pribadi. Kemacetan lalu lintas juga akan menambah konsumsi BBM secara tidak produktif atau mubadzir. Pemerintah DIY perlu membuat terobosan besar untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan system transpotasi massal yang hemat, cepat dan selamat sehingga mampu menekan pertumbuhan kendaraan pribadi. Kami meminta agar masalah ini menjadi perhatian khusus dan dimasukkan dalam raperda ini. Mohon tanggapannya.
  
6. Nilai konsumsi listrik per kapita terus mengalami kenaikan demikian juga dengan penambahan sambungan baru yang mencapai 40.000 per tahun. Namun demikian masih ada 11 % penduduk DIY yang belum terjangkau listrik jaringan. Fraksi PKS meminta pemerintah DIY agar segera memfasilitasi masyarakat DIY untuk mendapatkan jangkauan listrik jaringan pada tahun 2020 atau selambat-lambatnya sebelum RPJMD 2017 – 2022 berakhir. Mohon tanggapannya.

Demikian pandangan umum dari fraksi PKS terhadap raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah DIY.